



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
**LAPSING RAPAT KOMISI XIII DPR RI
(BIDANG: REFORMASI REGULASI dan HAM)**

Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia; Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; Kementerian Sekretaris Negara; Kantor Staf Presiden; Komnas HAM; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); Sekretariat Jenderal MPR RI; Sekretariat Jenderal DPD RI;

Tahun Sidang	: 2024 – 2025
Masa Persidangan	: I
Rapat	: Ke – 6 (enam)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Hukum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 4 November 2024
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II Lantai 2
Acara	: 1. Perkenalan Komisi XIII dengan Menteri Hukum 2. Hubungan Kemitraan Komisi XIII dengan Kementerian Hukum 3. Lain-lain
Ketua Rapat	: Willy Aditya (Ketua Komisi XIII DPR RI/ F.P Nasdem)
Sekretaris Rapat	: Sartomo, S.S., M.Si
Hadir	: A. Pemerintah - Menteri Hukum B. Orang Anggota dari 41 Orang Anggota Komisi XIII DPR RI. Izin Orang Anggota Komisi XIII DPR RI.

I. PENDAHULUAN

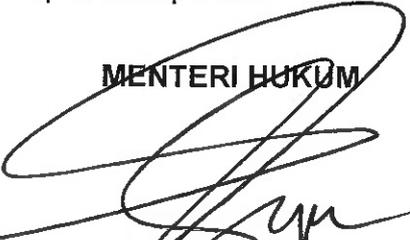
1. Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI pada Senin, 4 November 2024 dibuka pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Willy Aditya selaku Ketua Rapat Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Menteri Hukum, adalah:
 - a. Perkenalan Pimpinan dan Anggota Komisi XIII dengan Menteri Hukum dan jajarannya;
 - b. Penyampaian presentasi posisi kelembagaan Kantor Kementerian Hukum;
 - c. Lain-lain

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi XIII DPR RI mendukung langkah-langkah strategis Tim Transisi Kementerian Hukum dalam menyelesaikan transisi kelembagaan di Kementerian Hukum agar berjalan efektif dan efisien sesuai target yang akan diselesaikan Juni 2025.
2. Komisi XIII DPR RI mendukung program Kementerian Hukum untuk memprioritaskan kualitas SDM khususnya yang memiliki integritas tinggi dan penerapan *merit system* dalam meningkatkan kinerja.
3. Komisi XIII DPR RI dan Kementerian Hukum sepakat untuk mempertimbangkan ratifikasi perjanjian hak cipta (WIPO) dalam rangka perlindungan hak kekayaan intelektual.
4. Komisi XIII DPR RI meminta Menteri Hukum untuk mengedepankan penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang yang sudah lama tertunda, seperti rancangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan menindaklanjuti *deferred prosecution agreement*.
5. Komisi XIII DPR RI meminta Menteri Hukum untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi XIII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi XIII DPR RI paling lambat tanggal 12 November 2024.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 12.15 WIB


MENTERI HUKUM
Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H

Jakarta, 4 November 2024

KETUA RAPAT,

WILLY ADITYA
A-404